

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu yang kemudian disingkat nomenklaturnya menjadi Stasiun KIPM Palu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Palu yang berkedudukan di Jalan Garuda No 22 mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Palu menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2019 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawasan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Palu di Sulawesi Tengah diharapkan kualitas Laporan Keuangan Satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 30 September 2024 dan 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Palu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

<i>Basis Akuntansi</i>	A.3 Basis Akuntansi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
<i>Dasar Pengukuran</i>	A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UPT Stasiun KIPM Palu dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TW III Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah sebagai berikut:

<i>Pendapatan- LRA</i>	(1) Pendapatan-LRA Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
<i>Pendapatan LO</i>	(2) Pendapatan-LO Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.
<i>Belanja</i>	(3) Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) , Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
<i>Beban</i>	(4) Beban Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
<i>Aset</i>	5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Stasiun KIPM Palu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.707.673.000. Selama tahun 2024, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal sebanyak 15 kali yang disebabkan adanya peralihan anggaran ke Badan Karantina Indonesi, Penghematan belanja pemerintah/Revisi Buka Blokir, Revisi penambahan belanja pegawai, Penyesuaian POK dan penyesuaian halaman III DIPA. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Jasa	1.800.000	1.800.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	8.950.000	8.950.000
Jumlah Pendapatan	10.750.000	24.425.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.263.336.000	1.731.054.000
Belanja Barang	2.444.337.000	1.984.073.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	5.707.673.000	3.715.127.000

Realisasi Pendapatan
Rp18.779.130

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.779.130 atau mencapai 174.69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 10.750.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Jasa Karantina, dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi dan penerimaan kembali belanja pegawai TYAL, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan jasa karantina perikanan	1,800,000	60,000	3.33
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	8,950,000	18,645,000	208.32
3. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0	0.00
4. Penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL	0	74,130	0.00
5. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0.00
Jumlah	10,750,000	18,779,130	174.69

Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan TA 2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada periode 2024 mengalami Penurunan **129,83%** dari realisasi pendapatan Periode 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pengalihan/Perpindahan pendapatan PNBP Pendapan Jasa Karantina dan dan Pengujian Sertifikasi yang dialihkan ke BKI, dan adanya penerimaan kembali belanja pegawai tahun lalu senilai Rp. 74.130,

Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	60,000	3,620,000	(5,933.33)
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
3. Penerimaan kembali belanja pegawai T	74,130	-	-
4. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
5. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	18,645,000	39,540,000	(112.07)
Jumlah Pendapatan	18,779,130	43,160,000	(129.83)

Realisasi Belanja Rp
3.634.891.232

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.634.891.232 atau 97.84% dari anggaran belanja sebesar Rp. 3.715.127.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1,731,054,000	1,709,960,612	
Belanja Barang	1,984,073,000	1,925,301,093	
Belanja Modal	0	0	
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	3,715,127,000	3,635,261,705	97.85
Pengembalian Belanja	-	370,473	100
Belanja Netto	3,715,127,000	3,634,891,232	97.84

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (60,68) persen dibandingkan realisasi belanja TA 2023. Hal ini dikarenakan antara lain :

1. Penurunan belanja pegawai disebabkan sebanyak 14 Pegawai BPPMHKP Palu Beralih ke Badan Karantina Indonesia dan 1 orang beralih ke Sesban BPPMHKP
2. Penurunan belanja barang disebabkan karena perpindahan anggaran Karantina ikan dan belanja operasional perkantoran ke BKI.
3. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,709,590,139	3,202,118,684	(87.30)
Belanja Barang	1,925,301,093	2,474,934,476	(28.55)
Belanja Modal	0	163,639,530	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah Belanja	3,634,891,232	5,840,692,690	(60.68)

Belanja Pegawai
Rp1.709.590.139

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.709.590.139 dan Rp3.202.118.684. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember TA 2024 mengalami Penurunan sebesar 75.09 persen dari TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perpindahan pegawai sebanyak 14 orang dari BPPMHKP ke BKI.
2. Adanya mutasi pegawai 1 orang dari BPPMHKP ke Sesban BPPMHKP .

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	652,650,600	1,166,483,820	(78.73)
Belanja pembulatan gaji PNS	10,446	19,773	(89.29)
Belanja Tunj Suami/ Istri	54,108,200	90,600,200	(67.44)
Belanja Tunj Anak	12,433,370	22,705,876	(82.62)
Belanja Tunj Struktural PNS	17,280,000	17,640,000	(2.08)
Belanja Tunj Fungsional	14,705,000	52,580,000	(257.57)
Belanja Tunj PPh PNS	3,108,440	451,400	85.48
Belanja Tunj Beras PNS	36,282,420	71,913,060	(98.20)
Belanja Uang Makan PNS	92,547,000	204,594,000	(121.07)
Belanja Tunj Umum PNS	19,095,000	25,330,000	(32.65)
Belanja Uang Lembur	7,248,000	53,686,000	(100.00)
Belanja Tunjkin Pegawai	786,992,815	1,449,238,791	(84.15)
Belanja Gaji PPPK	8,707,038	22,914,595	(163.17)
BelanjaUang Lembur PPPK	0	0	(100.00)
belanja Tukin PPPK	4,792,283	23,961,415	(400.00)
Jumlah Belanja Kotor	1,709,960,612	3,202,118,930	(87.26)
Pengembalian Belanja Pegawai	370,473	246	
Jumlah Belanja Bersih	1,709,590,139	3,202,118,684	(87.30)

Belanja Barang Rp
1.925.301.093

B.4 Belanja Barang

1. Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.925.301.093 dan Rp2.474.934.476. Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2024 mengalami penurunan 28.80 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan perpindahan anggaran Dukman dan Operasional perkantoran dan anggaran kegiatan teknis ke Badan Karantina Indonesia Sulawesi Tengah.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik(Turun %)
Belanja Barang Operasional	430,254,923	851,897,246	(98.00)
Belanja Barang Non Operasional	29,805,450	77,343,798	(159.50)
Belanja Jasa	547,115,346	394,774,656	27.84
Belanja Pemeliharaan	369,089,135	420,533,167	(13.94)
Belanja Barang Persediaan	112,033,599	161,404,370	(44.07)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	437,002,640	573,871,489	(31.32)
Jumlah Belanja Kotor	1,925,301,093	2,479,824,726	(28.80)
Pengembalian belanja	-	4,890,250	
Jumlah Belanja Bersih	1,925,301,093	2,474,934,476	(28.80)

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp163.639.530. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami Penurunan 100 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2024

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	163.639.530	-100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	163.639.530	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	163.639.530	(100)

Belanja Modal Tanah
Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2024	2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp163.639.530. Tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2024.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2024	2023	Naik (Turun) %
Sice	0	44,788,500	100
Kursi Besi/Metal	0	8,951,040	100
Laptop	0	32,989,200	100
A.C. Split	0	16,466,850	100
Meja Receptionist	0	24,919,500	100
Kursi Dorong	0	35,524,440	100
Jumlah Belanja Kotor	0	163,639,530	100.0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.0
Jumlah Belanja Bersih	0	163,639,530	100.0

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0. Tidak terdapat belanja Gedung dan Bangunan di Kantor satker SKIPM Palu pada Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024.

TA 2024 dan TA. 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
 TA 2024 dan TA. 2023
 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Bantuan
 Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial
 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada per 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
 TA 2024 dan 2023
 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%
Belanja Bantuan sosial	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp.71.610.929

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 71.610.929 dan Rp.8.312.674
Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Uang di Bank	0	
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	0	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.4. Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu

12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di
Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka UPT Stasiun KIPM Palu per 31

Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan Rp71.610.929

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 71.610.929 dan Rp8.238.915 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	3,049,355	3,134,740
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	11,886,875	69,375
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Bahan Baku	56,674,699	5,034,800
6	Persediaan lainnya	-	-
	Jumlah	71,610,929	8,238,915

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp. 8,111,661,223

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,111,661,223 dan Rp10.021.791.768

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada UPT Stasiun KIPM Palu berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp4.445.700.000

C.2.1. Tanah
Tanah yang dimiliki oleh Daerah/UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4.445.700.000 dan Rp4.736.133.000, Transfer keluar Tanah dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari Stasiun KIPM Palu ke BKI Sulawesi Tengah, Sesuai BAST Nomor: 471/SKIPM.PALU/PL.450/XI/2024, tanggal 14 November 2024
Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2024	Rp 4,736,133,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp 290,433,000
Saldo per 31 Desember 2024	Rp 4,445,700,000
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2024	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp 4,445,700,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Jl. Garuda No. 22 Palu	1740 m2	4,445,700,000
Jumlah		-	4,445,700,000

Peralatan dan
Mesin
Rp 3,570,396,599

C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 3,570,396,599 dan Rp 5,200,909,531, Transfer keluar Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari Stasiun KIPM Palu ke BKI Sulawesi Tengah, Sesuai BAST Nomor: 471/SKIPM.PALU/PL.450/XI/2024 tanggal 14 November 2024
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2024	5,200,909,531
Mutasi Tambah	
Pembelian	-
mutasi kurang	
Penghapusan	-
Transfer keluar	1,630,512,932
Saldo per 31 Desember 2024	3,570,396,599
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2024	(3,223,947,629)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	346,448,970

Rincian Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Gedung dan Bangunan
Rp.
4,921,221,301

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 4,921,221,301 dan Rp6,194,588,601, Transfer keluar Gedung dan Bangunan dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari Stasiun KIPM Palu ke BKI Sulawesi Tengah, Sesuai BAST Nomor: 471/SKIPM.PALU/PL.450/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2024

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2024	6,194,588,601
Mutasi Tambah	
Pengembangan	-
mutasi kurang	-
Penghapusan	-
Transfer keluar	1,273,367,300
Saldo per 31 Desember 2024	4,921,221,301
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2024	(1,649,278,634)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	3,271,942,667

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 67,193,000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 67,193,000 dan Rp 94,142,000, Transfer jalan irigasi dan jaringan dikarenakan adanya perpindahan/peralihan asset dari Stasiun KIPm Palu ke BKI Sulawesi Tengah, Sesuai BAST Nomor: 471/SKIPM.PALU/PL.450/XI/2024 tanggal 14 November 2024.

dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2024	94,142,000
Mutasi tambah:	
Transfer Keluar:	26,949,000
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	67,193,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(19,623,414)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	47,569,586

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2024 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap
Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.					
2.					
	Jumlah				

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.
(4,892,849,677)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (4,892,849,677) dan Rp.(6.203.981.364)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas

dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	4.445.700.000	0	4.445.700.000
2.	Peralatan dan Mesin	3.570.396.599	(3,223,947,629)	346,448,970
3.	Gedung dan Bangunan	4.921.221.301	(1,649,278,634)	3,271,942,667
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.193.000	(19,623,414)	47,569,586
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	13.004.510.900	(4,892,849,677)	8,111,661,223

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2024 dan TA.2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.
Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM	-	-
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan Angsuran
Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.
Rincian TPA per Satker Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM	-	-
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2024
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak
Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada UPT Stasiun KIPM Palu – adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional UPT Stasiun KIPM Palu – dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2024	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.		0	0	0
2.		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp 24,236,245

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek UPT BPPMHKP Palu – per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 24,236,245 dan Rp17.831.425

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup UPT Stasiun KIPM Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	Stasiun KIPM Palu	0
2.		0
3.		0
	Jumlah	0

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp24,236,245

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 24,236,245 dan Rp17.831.425. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup UPT BPPMHKP Palu – per tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Layanan Telepon	2.385.845	Pembayaran telepon bulan desember 2024
2.	Belanja layanan listrik	21.727.900	Pembayaran listrik bulan desember 2024
3.	Belanja Layanan PDAM	122.500	Pembayaran PDAM bulan desember 2024
Total		24,236,245	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2024
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp
24,236,245

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.24,236,245 dan Rp 17.831.425, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2024 dan 2023
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	24,236,245	17.831.425
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	24,236,245	17.831.425

Ekuitas
Rp. 8,159,035,907

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 8,159,035,907 dan Rp 10.012.273.017. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp18.705.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp18.705.000 dan Rp43.160.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Sensor Karantina	60,000	3,620,000	-5933.33
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi	18,645,000	39,540,000	-112.07
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan M	-	-	0.00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	18,705,000	43,160,000	-130.74

Pendapatan Jasa merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa pemeriksaan laboratorium terhadap produk perikanan yang akan dilalulintaskan. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 130.74%. Hal ini disebabkan pengujian jasa sensor karantina dialihkan ke BKI.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp
1.709.590.139

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 1.709.590.139 dan Rp3.147.079.880. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2024	2023	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	652,650,600	1,196,740,390	(83.37)
Belanja pembulatan gaji PNS	10,073	20,862.	(107.11)
Belanja Tunj Suami/ Istri	54,108,200	87,509,180.	(61.73)
Belanja Tunj Anak	12,433,370	22,670,070.	(82.33)
Belanja Tunj Struktural PNS	17,280,000	15,480,000.	10.42
Belanja Tunj Fungsional	14,705,000	60,175,000.	(309.21)
Belanja Tunj PPh PNS	3,108,440	383,200.	87.67
Belanja Tunj Beras PNS	36,282,420	72,492,420.	(99.80)
Belanja Uang Makan PNS	92,547,000	221,236,000.	(139.05)
Belanja Tunj Umum PNS	18,724,900	23,300,000.	(24.43)
Belanja Uang Lembur	7,248,000	85,422,000.	(1,078.56)
Belanja tunjangan kinerja pegawai	786,992,815	1,361,650,758.	(73.02)
Belanja Gaji PPPK	7,893,038	0	100.00
Belanja Uang Makan PPPK	814,000	0	-
Belanja tunjangan kinerja PPPK	4,792,283	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	1,709,590,139	3,147,079,880	(84.12)

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan
Rp50.677.710

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.677.710 dan Rp284.713.290. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Persediaan Konsumsi	45,180,910	71,932,890
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	462,000	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Beban Persediaan bahan baku	5,034,800	212,780,400
6	Persediaan lainnya	-	-
Jumlah		50,677,710	284,713,290

Beban Barang
dan Jasa Rp
Rp989.344.294

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp989.344.294 dan Rp1.321.842.027. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi penurunan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peralihan anggaran di seluruh pos pos beban ke Badan Karfantina Indonesia dikarenakan berubah organisasi. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	329,464,441	563,229,196.	(70.95)
Beban Penambah daya tahan tubuh	7,846,000	74,517,350.	-
Beban Pengiriman Surat Dinas	4,255,000	4,867,400.	(12.58)
Beban Honor Operasional Satker	56,613,600	126,242,000.	(55.15)
Beban Barang Operasional Lainnya	32,075,882	83,041,300.	(61.37)
Beban Barang Ops - Penanganan Covid19	-	-	-
Beban Bahan	18,645,450	67,683,798.	(72.45)
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000	8,160,000.	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	1,500,000.	(100.00)
Beban Langganan Listrik	159,456,671	215,905,688.	(26.15)
Beban Langganan Telepon	28,777,250	39,203,177.	(26.59)
Beban Langganan Air	1,010,000	1,173,750.	(13.95)
Beban Sewa	-	54,944,000.	(100.00)
Beban Jasa Profesi	-	6,300,000.	-
Beban Jasa Lainnya	340,040,000	75,074,368.	352.94
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	-
Jumlah	989,344,294	1,321,842,027	(33.61)

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan
Rp369.324.135

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp369.324.135 dan Rp 326.592.294. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan biaya pemeliharaan disebabkan perbaikan peralatan laboratorium berupa laminari flow dan pemeliharaan gedung kantor menjadi 2 lantai Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / Turun
1	Beban Pemeliharaan Gedung bangunan	197,002,125	103,938,887.	(89.54)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	172,087,010	200,060,107.	13.98
3	Beban Persediaan untuk pemeliharaan	235,000	9,343,900.	97.48
4	Beban Persediaan suku cadang	-	13,249,400.	100.00
Jumlah		369,324,135	326,592,294	(13.08)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp
437.002.640

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 437.002.640 dan Rp 569.854.539. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh dialihkannya kegiatan perjalanan dinas dalam kota (Stufing dan koordinasi), Perjalanan dinas biasa (Perdin PIK san Jabi) serta Perdin paket meeting luar kota (Kegiatan Karantina) ke Badan Karantina Indonesia dikarenakan perubahan organisasi, Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	185,300,140	237,097,000.	(27.95)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,200,000	36,150,000.	(173.86)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	238,502,500	296,607,539.	(24.36)
Jumlah	437,002,640	569,854,539	(30.40)

Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
N I H			
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
N I H I L			
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 355,322,526

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 355,322,526 dan Rp 449.699.482. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	233,869,310	313.742.898	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	118,434,537	132.535.681	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,018,679	3.420.903	
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	

Jumlah Penyusutan	355,322,526	449.699.482	(79,01)
Beban Amortisasi Software	0	0	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	355,322,526	449.699.482	(79,01)

Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non
Operasional
Rp(0)

D.11 Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2024 dan 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	2024	2023	%
Pendapatan pelepasan asset non Lancar	-	-	-
Beban pelepasan asset non lancar	-	-	-
Beban dari keg. Non operasional lainnya	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban	0	0	0

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(0).
Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp371

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 371 dan Rp(0)
Koreksi ini merupakan koreksi perbaikan penyisihan piutang tidak tertagih. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut (Dokumen Terlampi)

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2024

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Lainnya	371
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp2.063.555.208

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 2.063.555.208 dan Rp 5.801.011.120
Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2024

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(18.779.130)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.634.891.232
Transfer Masuk	2.583.875
Transfer Keluar	(1.555.140.769)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2.063.555.208

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp1.8779.130 sedangkan DKEL sebesar Rp 3.634.891.232.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp.2.583.875 yang berasal dari sertifikat HC Mutu dari Sekretariat BPPMKHP dan transfer keluar (1.555.140.769) berupa Aset dari BPPMHKP Palu ke BKI Sulawesi Tengah terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2024			
No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Sertifikat Kesehatan Ikan	Sekretarias Badan KIPM - KKP	2.583.875
Jumlah			2.583.875

Transfer Keluar TA 2024			
No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Aset	BPPMHKP Palu ke BKI Sulawei Tengah	(1.555.140.769)
Jumlah			(1.555.140.769)

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp0. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung TA 2024

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.		Uang	
		Barang	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			

*Ekuitas Akhir Rp.
8,159,035,907*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 8,159,035,907 dan Rp 10.012.273.017.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui aplikasi SAKTI dan SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Stasiun KIPM Palu dan Stasiun KIPM Luwuk Banggai sebesar Rp. 24,236,245 yang terdiri tagihan listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp.21.727.900, tagihan telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp.2.385.845 dan tagihan PDAM bulan desember 2024 sebesar Rp. 122.500 yang telah dibuatkan Jurnal Memo Penyesuaiannya.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

- terdapat koreksi lainnya ditahun 2024 sebesar Rp.371.
- Program Prioritas Nasional tahun 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan lingkup BPPMKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp332.000.000,- dan realisasi sebesar Rp288.865.973,- atau 87.01% dari pagu, dengan rincian disajikan pada tabel realisasi anggaran belanja kegiatan Prioritas Nasional (PN) satker Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2024, terdapat beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Blokir).

Tabel 34
Program Prioritas Nasional TA.2024

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UP	Rp.15.000.000	Rp. 14.209.572	94,73
Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidas	Rp.15.000.000	Rp.6.167.150	41,11
Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Rp.125.000.000	Rp.122.292.734	97,83
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Rp.10.000.000	Rp.9.015.504	90,16
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan	Rp.40.000.000	Rp.37.997.716	94,99

Keamanan Hasil Perikanan			
Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	Rp.70.000.000	Rp.56.202.609	80,29
Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	Rp.9.000.000	Rp.8.000.000	88,88
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	Rp.39.000.000	Rp.29.023.484	74,42
Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	Rp.9.000.000	Rp.5.957.204	66,20
Total	Rp.332.000.000	Rp.288.865.973	87,01

Berdasarkan Keputusan Kepala Stasiun KIPM Palu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Stasiun KIPM Palu sebagai berikut: Pejabat Pembuat Komitmen : Hamzah, S.Pi,M.Si Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM: Rahma Tenri Aben, SE, Bendahara Pengeluaran : Muchlis, S.AP